

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subahanahu Wata'ala, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga "**Rencana dan Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023**" dapat kami wujudkan.

Tujuan Rencana dan Program Kerja ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan membudayakan disiplin agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara terencana, terprogram, terorganisir, dapat dipantau dan dievaluasi sejauh mana Rencana Kerja dan Program Kerja ini dicapai dalam tahun 2023 dilingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

Melalui Program Kerja ini dapat diketahui sejauh mana minat dan tujuan, prestasi kerja semakin meningkat positif, serta apa yang di capai oleh Pengadilan Tinggi Banten di tahun 2023 ini bisa tercapai yakni sebagai peran lembaga peradilan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Selain itu diharapkan pula dengan adanya rencana dan program kerja ini dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi setiap pejabat beserta pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat terlaksana tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdisiplin tinggi dan berwibawa.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka fungsi-fungsi manajemen harus terus-menerus dilakukan oleh setiap pimpinan/atasan, karena itu dalam pelaksanaan rencana dan program kerja ini masih diperlukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan.

Semoga rencana dan program kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 07 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang
B. Profil Pengadilan Tinggi Banten
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB II LANDASAN KERJA
A. Dasar Hukum
B. Visi dan Misi.....
C. Motto
D. Tujuan dan Sasaran
BAB III PROGRAM KERJA BERBASIS KINERJA
A. Program Kerja Kepaniteraan
1. Program Kerja Kepaniteraan Perdata
2. Program Kerja Kepaniteraan Pidana
3. Program Kerja Kepaniteraan Tipikor
4. Program Kerja Kepaniteraan Hukum
B. Program Kerja Kesekretariatan
1. Program Kerja Subbag Tata Usaha dan Tumbuh Tanga
2. Program Kerja Subbag Rencana Program dan Anggaran
3. Program Kerja Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
4. Program Kerja Subbag Keuangan dan Pelaporan
BAB IV PROGRAM KERJA BERBASIS ANGGARAN
A. Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
B. Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Peradilan Umum (03)
BAB V PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Program Kerja Pembinaan
B. Program Kerja Pengawasan
C. Program Kerja Akreditasi Penjaminan Mutu

BAB VI PROGRAM KERJA LAINNYA

- A. Program Kerja Perawatan Sarana dan Prasarana
- B. Program Kerja Pembinaan Mental dan Rohani
- C. Program Kerja Pembinaan Organisasi
- D. Program Kerja Monitoring dan Evaluasi

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

1. Rincian Kertas Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Dipa 01
2. Rincian Kertas Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Dipa 01
3. Rencana Penarikan Dana Dipa 01 Tahun 2023
4. Rencana Penarikan Dana Dipa 03 Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Banten merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum Provinsi Banten. Pengadilan Tinggi Banten bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan : Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

Penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten tidak dapat terlepas dari reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan keuangan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan tatalaksana (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi pokoknya tersebut, Pengadilan Tinggi Banten akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Segala rencana Kegiatan Pengadilan Tinggi Banten pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Program kerja mana yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana

dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

B. PROFIL PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pengadilan Tinggi Banten merupakan satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang: “mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.”

Sebagai dasar hukum, Pengadilan Tinggi Banten didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Bangka – Belitung, dimana untuk Pengadilan Tinggi Banten diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl. pada tanggal 24 Februari 2005. Untuk penerimaan perkara banding, mulai resmi beraktifitas sejak bulan April 2005.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pengadilan tinggi baru hasil dari pemisahan dari Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Sebelumnya, wilayah hukum Provinsi Banten masuk dan merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi Bandung. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001, maka timbul wacana untuk pembentukan sebuah Peradilan tingkat banding di Provinsi Banten, dikarenakan jarak dan efisisensi waktu, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan tidak lagi harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Banten, mungkin sebelum adanya otonomi daerah lebih dikenal sebagai bagian dari Provisnis Jawa Barat, dan tak jarang sampai sekarang masih banyak yang mengira demikian. Banten adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Jawa, dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2000 menjadi provinsi tersendiri dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000.

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN



Wilayah Banten terletak di antara $5^{\circ}7'50''$ - $7^{\circ}1'11''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}1'11''$ - $106^{\circ}7'12''$ Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah $9.160,70 \text{ km}^2$.

Batas wilayah Provinsi Banten, adalah:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Samudera Indonesia
- Barat : Selat Sunda
- Timur : Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat

Secara administratif Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Banten:

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Serang
4. Kabupaten Tangerang
5. Kota Cilegon
6. Kota Serang
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

Ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Banten berada di Kota Serang. Adapun untuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan meliputi :

1. Pengadilan Tinggi Banten, berkedudukan ditingkat Provinsi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

2. Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang, berkedudukan di Kota Tangerang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
3. Pengadilan Negeri Klas I A Serang, berkedudukan di Kota Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.
4. Pengadilan Negeri Klas II Pandeglang, berkedudukan di Kabupaten Pandeglang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang.
5. Pengadilan Negeri Klas II Rangkasbitung, berkedudukan di Kabupaten Lebak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak.

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai cakupan dan kewenangan di seluruh wilayah hukum Provinsi Banten dan juga sekaligus sebagai pengawas dari pengadilan negeri-pengadilan negeri yang berada pada wilayah hukumnya yang meliputi:

- Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang (untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan).
- Pengadilan Negeri Klas I A Tipikor, Niaga, PHI Serang (untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon).
- Pengadilan Negeri Klas II Pandeglang (Kabupaten Pandeglang).
- Pengadilan Negeri Klas II Rangkasbitung (Kabupaten Lebak).

Pengadilan Tinggi Banten berkedudukan di Kota Serang (sedang dalam pemekaran otonomi dengan Kab. Serang), Ibukota Provinsi Banten, berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM. 6,6 Cipocok Jaya – Serang. Dengan Nomor yang dapat dihubungi 0254- 250001-2 Fax. 0254-250002.

Awal berdirinya Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang ini, berturut-turut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing :

1. Bpk. H. Sanim Djarwadi, S.H. (dari tahun 2005 s.d. 2008)
2. Bpk. H. Soemarno, S.H., M.H. (dari tahun 2008 s.d. 2012)
3. Bpk. Th. Pudjiwahono, S.H., M.H. (dari tahun 2012
4. Bpk. I Gede Sumitra, S.H., M.H. (dari tahun 2012
5. Bpk. H. Mas'ud Haliem, S.H., M.H. (dari tahun 2012 s.d. 2014)
6. Bpk. H. Arwan Byrin, S.H., M.H. (dari tahun 2014 s.d. 2016)
7. Bpk. H. Abdul Kadir, S.H., M.H. (dari Maret 2016 s.d. September 2016)
8. Ibu Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum. (dari September 2016 s.d. Februari 2019)
9. Bpk. Haryanto, S.H., M.H (dari Februari 2019 s.d 2020)

10. Bpk. Respatun Wisnu Wardoyo, S.H. (dari April 2020 s.d September 2021)
11. Bpk. Charis Mardiyanto, S.H.,M.H. (dari September 2021 s.d Agustus 2022)
12. Ibu. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. (dari Agustus 2022 s.d sekarang)

Komposisi sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Banten pada Januari 2023 adalah:

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan	1
2	Wakil Ketua Pengadilan	1
3	Hakim Tinggi	19
4	Hakim Adhoc	1
5	Hakim Yustisial	4
6	Panitera	0
7	Sekretaris	1
8	Kabbag	1
9	Panitera Muda	4
10	Kasubbag	4
11	Panitera Pengganti	17
12	Fungsional tertentu	1
13	Staf	13
14	Honor	15
Total		82

C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Tinggi Banten secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1

UU No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang (Pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004)

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “*Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.*” (vide : pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

2. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

5. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

6. Fungsi Lainnya

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/SK/II/1992).

BAB II LANDASAN KERJA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Bindalmin, serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IV);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/SK/1/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia;
9. DIPA Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.01.2.663398/2023 dan SP DIPA- 005.03.2.663399/2023 tanggal 30 November 2022.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Visi Pengadilan Tinggi Banten: *"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Banten Yang Agung"*

Misi Pengadilan Tinggi Banten:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Banten.

C. MOTO PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pengadilan Tinggi Banten memiliki Moto “BADUI” yang merupakan singkatan dari “**B**ermartabat, **A**dil, **D**inamis, **U**tama dan **I**ndah”.

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Arah dan Kebijakan pelayanan hukum pada Pengadilan Tinggi Banten adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, independensi dan akuntabel serta transparansi, maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Banten sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Program :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam Pelaksanaan Program ini adalah :

- Kegiatan / Aktivitas Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :
 1. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten
 2. Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten
 3. Peningkatan kualitas tenaga teknis
 4. Pembinaan dan Pengawasan
- 2. Dukungan Manajemen dengan program :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam Pelaksanaan Program ini adalah :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :
 1. Layanan Perkantoran
 2. Layanan Umum
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :
 1. Layanan Sarana Internal

BAB III

PROGRAM KERJA BERBASIS KINERJA

Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Program kerja juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dan menjadi evaluasi dari kinerja suatu organisasi.

Program kerja harus berbasis kinerja sehingga beberapa tujuan dan manfaat dari penyusunan program kerja dapat terlaksana, diantaranya :

1. Membantu dalam pencapaian visi dan misi
2. Membantu organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur

Program kerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Program kerja Pengadilan Tinggi Banten berbasis kinerja merupakan gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan guna mencapai outcome /hasil dari tujuan serta Visi dan Misi dari Pengadilan Tinggi Banten. Dalam melakukan penilaian kinerja dari pelaksanaan program kerja maka harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan.

Program kerja Pengadilan Tinggi Banten harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, program kerja ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui program kerja ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan program kerja ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama satu tahun berjalan. Rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. PROGRAM KERJA KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	91,68
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

B. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN

1. Program Kerja Kepaniteraan Perdata

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding	100%
2	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohona	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan	100%
3	Terlaksananya registrasi perkara banding	Persentase registrasi perkara banding perdata selesai tepat waktu	100%
4	Terlaksananya registrasi perkara gugatan dan permohonan	Persentase registrasi perkara gugatan dan permohonan selesai tepat waktu	100%

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terlaksananya distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	Persentase pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi tepat waktu	100%
6	Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	Persentase pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi tepat waktu	100%
7	Terlaksananya pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju	Persentase pelaksanaan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju tepat waktu	100%
8	Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Persentase pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	100%
9	Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	Persentase pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum tepat waktu	100%
10	Terlaksananya Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Muda Perdata	Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat masuk	100%
		Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat keluar	100%
		Terlaksananya Pembuatan Laporan Perkara Perdata	12 Laporan
10	Terlaksananya Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Perdata	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Perdata	12 Dokumen

Untuk melaksanakan program kerja rutin kepaniteraan Perdata , anggarannya dibebankan pada Biaya Proses Perkara Banding sebesar Rp. 150.000,- / perkara banding.

2. Program Kerja Kepaniteraan Pidana

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara anak banding	100%
2	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana banding	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana banding	100%
3	Terlaksananya registrasi perkara banding	Persentase registrasi perkara anak banding selesai tepat waktu	100%
4	Terlaksananya registrasi perkara pidana banding	Persentase registrasi perkara pidana banding selesai tepat waktu	100%
5	Terlaksananya distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	Persentase pelaksanaan distribusi perkara anak banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi tepat waktu	100%
		Persentase pelaksanaan distribusi perkara pidana banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi tepat waktu	100%
6	Terlaksananya perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan	Persentase pelaksanaan perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan	100%

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	Persentase pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi tepat waktu	100%
8	Terlaksananya pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju	Persentase pelaksanaan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju tepat waktu	100%
9	Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Persentase pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	100%
10	Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	Persentase pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum tepat waktu	100%
11	Terlaksananya Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Muda Pidana	Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat masuk	100%
		Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat keluar	100%
		Terlaksananya Pembuatan Laporan Perkara Pidana	12 Laporan
10	Terlaksananya Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Pidana	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Pidana	12 Laporan

Untuk melaksanakan program kerja rutin kepaniteraan pidana Tipikor , anggarannya dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan Tinggi Banten No. SP DIPA-005.03.2.663399/2023 tanggal 30 November 2022.

3. Program Kerja Kepaniteraan Pidana Tipikor

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus	100%
2	Terlaksananya registrasi perkara khusus	Persentase registrasi perkara khusus banding selesai tepat waktu	100%
3	Terlaksananya distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	Persentase pelaksanaan distribusi perkara khusus banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi tepat waktu	100%
4	Terlaksananya perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus	Persentase pelaksanaan perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus	100%
5	Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	Persentase pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi tepat waktu	100%
6	Terlaksananya pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju	Persentase pelaksanaan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju tepat waktu	100%
7	Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Persentase pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	100%

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	Persentase pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum tepat waktu	100%
9	Terlaksananya Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Muda Pidana	Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat masuk	100%
		Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat keluar	100%
		Terlaksananya Pembuatan Laporan Perkara Khusus	12 Laporan
10	Terlaksananya Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Pidana Khusus	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Pidana Khusus	12 Laporan

Untuk melaksanakan program kerja rutin kepaniteraan pidana Khusus , anggarannya dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan Tinggi Banten No. SP DIPA-005.03.2.663399/2023 tanggal 30 November 2022.

4. Program Kerja Kepaniteraan Hukum

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara	Penyajian/Laporan data perkara perdata perbulan untuk menilai capaian IKU PT Banten	12 laporan
		Penyajian/Laporan data perkara Pidana perbulan untuk menilai capaian IKU PT Banten	12 laporan
		Penyajian/Laporan data perkara Khusus/Tipikor perbulan untuk menilai capaian IKU PT Banten	12 laporan
2	Terlaksananya penyajian Statistis Perkara	Jumlah laporan statistik perkara pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya	12 laporan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara	Persentase pelaksanaan penyusunan keadaan perkara yang di input kedalam pelaporan Badilum	100%
4	Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara	Persentase pelaksanaan pengarsipan berkas perkara pidana	100%
		Persentase pelaksanaan pengarsipan berkas perkara Perdata	100%
		Persentase pelaksanaan pengarsipan berkas perkara Khusus / Tipikor	100%
5	Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat	Jumlah laporan / data pengaduan	12 laporan
		Jumlah laporan layanan informasi Publik	4 Laporan
6	Terlaksananya penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Jumlah penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi	2 Laporan
7	Terlaksananya Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Muda Pidana	Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat masuk	100%
		Prosentase pelaksanaan pengelolaan surat keluar	100%
8	Terlaksananya Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Hukum	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kepaniteraan Muda Hukum	12 Laporan

B. PROGRAM KERJA KESEKRETARIATAN

1. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemantauan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah penyusunan rencana Program Kerja Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	1 Laporan
		Persentase pengelolaan BMN dengan tertib dan baik	100%
		Persentase pelaksanaan pembuatan laporan inventaris dan terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) dan Stock Opname dengan baik	100%
2	Terlaksananya Urusan Keamanan, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	Persentase kegiatan protokoler dengan baik dan benar	100%
		Terciptanya situasi keamanan yang kondusif	100%
3	Terlaksananya Urusan Surat Menyurat Kearsipan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan administrasi tata persuratan dan penataan arsip surat dengan baik dan benar serta tersusun rapi	100%
		Persentase terlaksananya konsep surat dengan baik dan benar	100%
4	Terlaksananya Urusan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Sarana dan Prasarana serta Perlengkapan dan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan kebersihan, keindahan lingkungan kantor dengan baik	100%
		Persentase pelaksanaan sarana tempat parkir bertata rapih dan baik	100%
		Persentase pelaksanaan ruang perpustakaan dengan baik	100%

2. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyusunan RKA K/L atau DIPA	Penyusunan RKBMN PT Banten tahun 2025	1 Dokumen
		Penyusunan Bahan Usulan Pagu Indikatif RKAK/L TA 2024 DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten dan PN Sewilayah Banten	10 Dokumen
		Penyusunan bahan usulan pagu definitif RKAK/L TA. 2024 DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten dan PN sewilayah Banten	10 Dokumen
		Penyusunan bahan usulan pagu awal RKAK/L TA. 2025 DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten dan PN sewilayah Banten	10 Dokumen
2	Terlaksananya penyusunan program kerja, perencanaan kinerja dan laporan	Penyusunan Program Kerja PT Banten	1 Dokumen
		Penyusunan dokumen SAKIP IKU/Review IKU, Renstra/Review Renstra, RKT, PKT, Rencana Aksi PT Banten sesuai hasil rapat Tim.	5 Dokumen
		Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan PT Banten berdasarkan repitulasi laporan dari PN sewilayah Banten.	1 Dokumen
		Penyelesaian LKjIP dan pengiriman Dokumen SAKIP (hardcopy ke evlap dan softcopy upload di website, esakip komdanas dan esakip menpan)	1 Dokumen
		Penyusunan laporan hasil evaluasi SAKIP PN sewilayah Banten	1 Dokumen
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran	Monev capaian IKU PT Banten	4 Dokumen
		Monev anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten untuk kesesuaian RPD dengan realisasi di aplikasi SMARTDJA	4 Dokumen
		Monev program kerja dan 5R subag RPA	12 Dokumen
		Pelaksanaan revisi anggaran DIPA PT Banten sesuai instruksi KPA/ PPK/ Eselon-1	8 Dokumen
4	Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan surat keluar subag Rencana Program dan Anggaran (RPA)	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar subag RPA	100 %
5	Terlaksananya pengelolaan Hibah	Pengolaan Hibah	100 %

3. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan penyusunan laporan	12 Dokumen
		Pemantau dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Subbag Keuangan dan Pelaporan	12 Dokumen
2	Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Presentase pelaksanaan pengelolaan dan perawatan jaringan area lokal dan internet	100%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi	100%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan Website dan Media Sosial	100%
3	Terlaksananya penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai	Persentase penyusunan bahan panitia seleksi penerimaan CPNS/PPPK, Hakim Adhoc, serta eksaminasi Hakim Tinggi	100%
		Persentase pengiapan bahan pengangkatan CPNS	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan penghargaan pegawai	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan izin belajar, pencantuman gelar dan penyesuaian basis pendidikan	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan dan pemanggilan pendidikandan pelatihan	100%
		Persentase penyiapan bahan usulan pembuatan kartu pegawai dan kartu istri / suami	100%
		Persentase penyiapan bahan kenaikan gaji berkala	100%
4	Terlaksananya usulan kenaikan pangkat hakim dan pegawai	Persentase penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat hakim dan pegawai	100%

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terlaksananya usulan kenaikan pangkat hakim dan pegawai	Persentase penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100%
5	Terlaksananya usulan promosi dan mutasi pegawai	Persentase penyiapan bahan pengusulan promosi	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan alih tugas	100%
6	Terlaksananya Usulan Pemberhentian dan Pensiun	Persentase penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun	100%
		Persentase penyusunan laporan pegawai yang meninggal dunia	100%
7	Terlaksananya pengelolaan sasaran kinerja pegawai	Persentase penyusunan sasaran kinerja pegawai	100%
8	Terlaksananya pengelolaan administrasi jabatan, Hakim, Struktural, Fungsional dan Pelaksanaan	Persentase penyusunan bahan surat pengusulan jabatan hakim	100%
		Persentase penyusunan bahan surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan menduduki jabatan	100%
		Persentase penyusunan bahan persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	100%
		Persentase penyusunan bahan surat pelaksanaan tugas dan surat pelaksana harian	100%
9	Terlaksananya pengelolaan kedisiplinan pegawai	Persentase pelaksanaan rekapitulasi presensi	100%
		Persentase pengelolaan cuti dan izin	100%
		Persentase penyusunan bahan pemeriksaan, pengaduan, pemberian hukuman disiplin dan laporan penegakan disiplin	100%
10	Terlaksananya pengelola Tata Naskah Dinas	Persentase penyusunan surat keputusan, surat tugas dan surat-surat lainnya	100%
		Persentase pengelolaan arsip surat masuk dan keluar bidang kepegawaian dan teknologi informasi	100%

4. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan pelaporan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Satker dan Wilayah Dipa 01	6 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan Keuangan Satker dan Wilayah Dipa 03	6 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan BMN Wilayah Dipa 01	3 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan BMN Wilayah Dipa 03	3 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan Keuangan Satker dan Wilayah DIPA 01 dan DIPA 03	100 %
2	Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi	Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan DIPA 01 dan DIPA 03	24 Laporan
		Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan DIPA 01 dan DIPA 03	100 %
3	Terlaksananya pengelolaan BMN	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan BMN DIPA 01 dan DIPA 03	30 Laporan
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan BMN	100 %
7	Terlaksananya pemantauan monitoring dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan (Laporan Realisasi Anggaran) DIPA 01 dan DIPA 03	8 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi E-Monev Bappenas Satker Dipa 01	4 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi E-Monev Bappenas Satker Dipa 03	4 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Output dan IKPA Satker Dipa 03	4 laporan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terlaksananya pemantauan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Output dan IKPA Satker Dipa 01	4 laporan
		Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan DIPA 01 dan DIPA 03	100 %
		Pemantau dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Subbag Keuangan dan Pelaporan	12 Dokumen

BAB IV
PROGRAM KERJA BERBASIS ANGGARAN

A. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINSTRASI (01)

DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi dengan Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Banten TA 2023 sebesar Rp. 24.941.516.000,- (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah*), dari jumlah tersebut terdapat 3 (tiga) output/kegiatan belanja masing-masing:

NO	Keterangan	Pagu
1.	Belanja Pegawai (51)	Rp. 21.915.732.000,-
2.	Belanja Barang (52), terdiri dari :	
	a. Belanja Non Operasional Satker Daerah	Rp. 65.149.000,-.
	b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 2.960.635.000,-
3.	Belanja Modal (53)	Rp. 0,-
JUMLAG PAGU ANGGARAN DIPA (01)		Rp. 24.941.516.000,-

Adapun Rincian Kegiatan Berbasis Anggaran Pengadilan Tinggi Banten DIPA 01 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (51) berupa Pembayaran gaji dan Tunjangan

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pembayaran Gaji bulan Januari	Rp. 1.337.222.000,-	Januari s.d Desember 2023
2	Pembayaran Gaji bulan Februari	Rp. 1.465.719.000,-	
3	Pembayaran Gaji bulan Maret	Rp. 1.536.199.000,-	
4	Pembayaran Gaji bulan April	Rp. 3.016.027.000,-	
5	Pembayaran Gaji bulan Mei	Rp. 1.578.619.000,-	
6	Pembayaran Gaji bulan Juni	Rp. 1.578.619.000,-	
7	Pembayaran Gaji bulan Juli	Rp. 3.017.527.000,-	
8	Pembayaran Gaji bulan Agustus	Rp. 1.580.119.000,-	
9	Pembayaran Gaji bulan September	Rp. 1.584.119.000,-	
10	Pembayaran Gaji bulan Oktober	Rp. 1.586.119.000,-	
11	Pembayaran Gaji bulan November	Rp. 1.636.119.000,-	
12	Pembayaran Gaji bulan Desember	Rp. 1.999.324.000,-	
Total Anggaran		Rp. 21.915.732.000,-	

2. Belanja Barang (52) Non Operasional Satker Daerah

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Inventaris Perkantoran CPNS	Rp. 5.556.000,-	Bulan Maret 2023
2	Bimtek Teknis Keuangan	Rp. 59.593.000,-	Bulan Oktober 2023
	Total Anggaran	Rp. 65.149.000,-	

3. Belanja Barang (52) Operasional Satker Daerah (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp. 726.140.000,-	Januari s.d Desember 2023
2	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 712.500.000,-	Januari s.d Desember 2023
3	Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 834.951.000,-	Januari s.d Desember 2023
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp. 172.324.000,-	Januari s.d Desember 2023
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	Rp. 21.510.000,-	April & Desember 2023
6	Rapat Koordinasi Internal	Rp. 20.520.000,-	Januari s.d Desember 2023
7	Konsultasi ke Pusat	Rp. 111.520.000,-	Januari s.d Desember 2023
8	Pembinaan/Rapat Koordinasi Pada Tingkat Banding	Rp. 16.160.000,-	Januari s.d Desember 2023
9	Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL	Rp. 6.600.000,-	Januari s.d Desember 2023
10	Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	Rp. 287.280.000,-	Per 3 bulan Dibayar pada bulan Februari, Mei, Agustus & November 2023
11	Pembinaan/Pengawasan	Rp. 51.120.000,-	Juni & November 2023
	Total Anggaran	Rp. 2.960.635.000,-	

4. Belanja Modal (53) Layanan Sarana Internal

Pada tahun Anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Banten tidak mendapatkan Pagu Belanja Modal.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIPA BADILUM (03)

DIPA 03 unit organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 176.444.000,- (*Seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*), terdiri dari :

1. Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding sebesar Rp. 85.000.000,- untuk 5 kegiatan.

Berkaitan dengan Program Pembinaan/Pengawasan Layanan Peradilan daerah yang ditetapkan dalam program kerja pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023, maka disusunlah program pembinaan/pengawasan ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dengan dibiayai dengan DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

2. Anggaran yang tertuang dalam DIPA 03 adalah alokasi anggaran untuk penyelesaian perkara pidana sebesar Rp. 54.319.541,- (*Lima puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*) dan untuk penyelesaian perkara pidana Korupsi sebesar Rp. 16.940.000,- (*Enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Dalam tabel seperti dibawah ini :

NO	Keterangan	Pagu
1.	Belanja Barang (52) , terdiri dari :	
.	1. Pembinaan dan Pemeriksaan	Rp. 85.000.000,-
	2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding	Rp. 74.504.000,-
	3. Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding	Rp. 16.940.000,-
JUMLAG PAGU ANGGARAN DIPA (03)		Rp. 176.444.000,-

Adapun Rincian Kegiatan Berbasis Anggaran Pengadilan Tinggi Banten DIPA 03 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pemeriksaan

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pembinaan ke 4 PN Sewilayah Banten	Rp. 37.000.000,-	Juni 2023
2	Pemeriksaan ke 4 PN Sewilayah Banten	Rp. 48.000.000,-	Oktober 2023
Total Anggaran		Rp. 85.000.000,-	

2. Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding (134 Perkara)

NO	KEGIATAN/DETAIL ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
051	Pengiriman Surat Penahanan	Rp. 20.100.000,-	Januari s.d Desember 2023
052	Pencatatan Register Banding	Rp. 27.604.000,-	
053	Minutasi	Rp. 6.700.000,-	
054	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	Rp. 20.100.000,-	
	Total Anggaran	Rp. 74.504.000,-	

3. Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding (23 perkara)

NO	KEGIATAN/DETAIL ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
051	Pengiriman Surat Penahanan	Rp. 4.000.000,-	Januari s.d Desember 2023
052	Pencatatan Register Banding	Rp. 8.940.000,-	
053	Minutasi	Rp. 2.000.000,-	
054	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	Rp. 2.000.000,-	
	Total Anggaran	Rp. 16.940.000,-	

Sebagai tolak ukur dalam pencapaian terhadap penyerapan realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2023 ini, maka perlu membuat target perbandingan dengan anggaran tahun 2022 terhadap program atau kegiatan yang dianggarkan, dimana Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2022 memperoleh anggaran pagu dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini :

No	DIPA	Pagu	Anggaran	
			Target (%)	Realisasi (Rp & %)
1	DIPA 01	Rp. 24.815.678.000,-	100	Rp. 24.620.084.826,- (99.21%)
2	DIPA 03	Rp. 242.245.000,-	100	Rp. 239.460.385,- (98,85%)

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PROGRAM KERJA PEMBINAAN

Pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten kepada seluruh Hakim, ASN dan Tenaga Honorer yang berada di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten dan juga kepada seluruh. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

1. Pembinaan Tingkat Banding ke Tingkat Pertama

- Mengadakan Pembinaan mengenai teknis administrasi baik perkara maupun Administrasi pendukung lainnya 2 kali dalam setahun yaitu periode bulan Juli dan November 2023.

2. Program Kerja Koordinasi

- Mengadakan rapat Pimpinan tentang kebijakan baru;
- Mengadakan rapat reguler bulanan dengan Hakim Tinggi Pengawas Bidang;
- Mengadakan rapat regular bulanan dengan Panitera Muda Dan Kepala Sub Bagian;
- Mengadakan rapat regular bulanan dengan Para Hakim Tinggi dan seluruh Pegawai.

3. Program Kerja Pembangunan Zona Integritas / APM

- Mengadakan monitoring dan Evaluasi secara berkala pelaksanaan Zona Integritas/WBK/WBBM
- Mengadakan Pembinaan kepada seluruh satuan kerja tentang Zona Integritas/WBK/WBBM
- Mengupdate secara berkala dokumen zona Integritas
- **Asesmen Internal**
 - Melaksanakan asesmen internal pada semua bidang Pengadilan Tinggi Banten oleh Tim Asesmen Internal berdasarkan SK KPT dilaksanakan dua kali setahun
 - Pengadilan Tinggi mengirim laporan hasil asesmen internal ke TAPM Direktorat Jenderal Badilum

4. Program Kerja Pra Asesmen Eksternal Oleh TAPM PT Ke Pengadilan Negeri

- Tim TAPM Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan SK KPT melaksanakan pra asesmen eksternal ke Pengadilan Negeri atas permohonan PN yang bersangkutan telah siap untuk di asesmen
- Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, diberi waktu untuk memperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan

5. Program Kerja Sosialisasi

- Sosialisasi RKA-KL Dipa 01 dan Dipa 03 Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2023
- Mengadakan sosialisasi regulasi kebijakan Mahkamah Agung, berupa PERMA, SEMA, SK KMA dan UU yang baru
- Sosialisasi Reviu Renstra dan Reviu IKU pengadilan Tinggi Banten
- Sosialisasi lainnya yang bersifat sesuai Kebutuhan.

6. Program Kerja Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak/Honorar

- Membuat SK Tim Evaluasi Kinerja tenaga honorar, terdiri dari, sekretaris, Kabag Kepegawaian dan Perencanaan, Kasub Kepegawaian, Kasub Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga honorar perbulan melalui rapat kesekretariatan
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga honorar tahunan
- Untuk mengetahui apakah kontrak kinerja para honorar untuk tahun depan tetap dilanjutkan Tim evaluasi memberi arahan dan motivasi agar kinerja para honorar lebih baik dan ditingkatkan kedepan.

B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN

1. Program Kerja Pengawasan Bidang

➤ Berikut alur Pengawasan di Pengadilan Tinggi Banten :

1. Hakim Tinggi Pengawas Bidang melakukan pengawasan ke bidang – bidang
2. Hasil Pengawasan Bidang tersebut diserahkan ke Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten
3. Masing-masing bidang berdasarkan hasil temuan Hakim Tinggi pengawas bidang tersebut melakukan rapat berjenjang dengan Panitera/Sekretaris dan Pelaksanan
4. Rapat bulanan

➤ Hakim Tinggi melaksanakan tugas pengawasan bidang berdasarkan SK Ketua minimal sekali dalam sebulan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Hakim Tinggi Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kinerja masing-masing bidang
- ✓ Hakim Tinggi melaporkan secara tertulis hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawas untuk dibicarakan dalam rapat pengawasan yang dipimpin Wakil Ketua
- ✓ Wakil Ketua merekomendasikan kepada Ketua untuk ditindak lanjuti

2. Program Kerja Pengawasan Melekat

- Panitera melakukan pengawasan melekat setiap hari kerja mengawasi kinerja seluruh pegawai, langsung memberikan bimbingan dan arahan agar pekerjaan pegawai dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
- Sekretaris setiap hari melaksanakan pengawasan melekat terhadap kinerja semua pegawai, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan keindahan lingkungan kerja kantor, dan selalu memberikan, dibantu oleh Kepala Bagian

3. Program Kerja Pengawasan Daerah

- Hakim Tinggi Pengawas Daerah melaksanakan tugas pengawasan daerah berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten 2 (dua) kali dalam setahun sesuai anggaran DIPA Tahun 2023.

- Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan berpedoman kepada buku Panduan Pengawasan Daerah yang disediakan sekaligus memberikan penilaian kinerja Pengadilan Negeri yang diperiksa;
- Hakim Tinggi Pengawas Daerah membuat laporan tertulis atas pemeriksaannya yang disampaikan kepada wakil ketua selaku koordinator pengawas;
- Ketua Pengadilan Tinggi mengirim Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Daerah kepada KABAWAS Mahkamah Agung.

BAB VI

PROGRAM KERJA LAINNYA

A. PROGRAM KERJA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA

1. Menata Lingkungan Kantor

- Menata halaman depan dan belakang kantor menjadi bersih
- Menata lahan parkir kendaraan mobil dan motor
- Menanam tanaman dan menjaganya
- Menjaga kebersihan sarana dan prasarana kantor lainnya

2. Menata Ruangan Kantor Dengan Prinsip 5 (lima) R yaitu : (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)

- Menata Ruangan Kerja Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015
- Menata ruangan sidang sesuai dengan wujudnya
- Menata Ruang Arsip Perkara
- Menata Ruang Perpustakaan
- Menata Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian menurut prinsip 5 (lima) R

B. PROGRAM KERJA PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI

1. Program Kerja Iman dan Taqwa

- Mengadakan Ceramah Agama pada minggu ke 2 setiap bulannya.
- Mengadakan Ceramah Agama pada saat bulan Ramadhan dan Halal Bi Halal
- Mengadakan acara Buka Puasa Bersama di bulan Ramadhan
- Mengadakan aksi sosial ke panti asuhan atau korban bencana alam
- Mengadakan pemotongan Qurban pada Hari Idul Adha
- Mengadakan Sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah setiap hari kerja dilanjutkan pembacaan Hadist.
- Mengadakan Pengajian OWOJ (One Week One Juz)

2. Program Kerja Olah raga dan Seni

- Mengadakan Senam Bersama setiap hari Jumat pagi
- Mengadakan Latihan Line Dance bersama setiap setelah senam
- Mengadakan lomba Olah Raga dan Seni pada momentum HUT hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, dan pada HUT MA-RI Tanggal 19 Agustus
- Mengadakan tenis lapangan, tenis meja, sepeda santai setiap hari Jumat

2. Program Kerja Peringatan Hari Bersejarah

- Mengadakan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan RI ke 77 tanggal 17 Agustus 2023
- Mengadakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2023
- Mengadakan Upacara Bendera Hari besar Kenegaraan lainnya

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN ORGANISASI

- Pembinaan dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Organisasi IKAHI Cabang Pengadilan Tinggi Banten
- Pembinaan dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Organisasi IPASPI Cabang Pengadilan Tinggi Banten
- Pembinaan dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Organisasi PTWP Daerah dan Cabang Pengadilan Tinggi Banten
- Ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Cakra Sejahtera Pengadilan Tinggi Banten
- Ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Organisasi BAPOR Pengadilan Tinggi Banten
- Pembinaan dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Organisasi Dharmayukti Karini Provinsi Banten.

D. PROGRAM KERJA MONITORING DAN EVALUASI

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tupoksi Penyelesaian Perkara
 1. Penyelesaian perkara tepat waktu
 2. Pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pembangunan zona integritas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan bidang dan daerah
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lainnya :
 1. Monitoring dan Evaluasi kinerja Agen Perubahan
 2. Monitoring dan Evaluasi PTSP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keseluruhan program kerja tersebut di atas akan dilaksanakan dengan mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, sehingga Pengadilan Tinggi Banten diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Melalui Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Banten sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Banten akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

B. REKOMENDASI

Program kerja ini berupa target untuk meningkatkan kinerja baik dibidang Kepaniteraan maupun dibidang Kesekretariatan. Oleh karena itu dirokemendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program kerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tupoksi bagi masing – masing bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
2. Melakukan monitoring dan Evaluasi baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk efektifitas dari pelaksanaan program kerja ini.

Demikian Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 ini dibuat agar dijadikan sebagai Pedoman dalam pencapaian target kinerja masing-masing bidang.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 24,941,516,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24,941,516,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			24,941,516,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		24,941,516,000	
<hr/>					
	Lokasi : KOTA SERANG				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Laporan		65,149,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			65,149,000	
A	Inventaris Perkantoran CPNS			5,556,000	
521252	<u>Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel</u> (KPPN.020-Serang)			5,556,000	RM
	- Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	3.0 OT	1,852,000	5,556,000	
B	BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN			59,593,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang)			4,393,000	RM
	- Bahan	1.0 KEG	4,393,000	4,393,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.020-Serang)			2,400,000	RM
	- Narasumber (1 ORG x 3 JPL x 2 KEG)	6.0 JPL	400,000	2,400,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.020-Serang)			52,800,000	RM
	- Uang harian (40 ORG x 2 HR x 1 KEG)	80.0 OH	85,000	6,800,000	
	- Paket Meeting Fullday (40 ORG x 2 HR x 1 KEG)	80.0 OH	425,000	34,000,000	
	- Transport (40 ORG x 2 HR x 1 KEG)	80.0 OH	150,000	12,000,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		24,876,367,000	
001	Gaji dan Tunjangan			21,915,732,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			21,915,732,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.020-Serang)			4,913,839,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	4,231,839,000	4,231,839,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	341,000,000	341,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	341,000,000	341,000,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.020-Serang)			60,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	52,000	52,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,000	4,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.020-Serang)			391,180,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	337,180,000	337,180,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	27,000,000	27,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	27,000,000	27,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (653398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 24,941,516,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.020-Serang)			63,934,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	55,734,000	55,734,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,100,000	4,100,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,100,000	4,100,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.020-Serang)			93,870,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	80,460,000	80,460,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,705,000	6,705,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,705,000	6,705,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.020-Serang)			12,640,730,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	11,000,730,000	11,000,730,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	820,000,000	820,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	820,000,000	820,000,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.020-Serang)			2,417,944,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	2,017,706,000	2,017,706,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	200,119,000	200,119,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	200,119,000	200,119,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.020-Serang)			188,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	188,000,000	188,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.020-Serang)			700,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	700,000,000	700,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.020-Serang)			43,890,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	36,930,000	36,930,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,480,000	3,480,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,480,000	3,480,000	
511158	<u>Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc</u> (KPPN.020-Serang)			464,285,000	RM
	- Tunjangan Hakim AdHoc Tipikor [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	17,857,143	464,285,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,960,635,000	
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			726,140,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 24,941,516,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			620,266,000	RM
	- Honorarium Pramubkahti [12 BLN x 7 ORG]	84.0 OB	2,708,000	227,472,000	
	- Honorarium Satpam [12 BLN x 4 ORG]	48.0 OB	2,978,000	142,944,000	
	- Honorarium Pengemudi [12 BLN x 4 ORG]	48.0 OB	2,978,000	142,944,000	
	- THR Pramubkahti [1 BLN x 7 ORG]	7.0 OB	2,708,000	18,956,000	
	- THR Satpam [1 BLN x 4 ORG]	4.0 OB	2,978,000	11,912,000	
	- THR Pengemudi [1 BLN x 4 ORG]	4.0 OB	2,978,000	11,912,000	
	- Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	12.0 BLN	1,300,000	15,600,000	
	- Biaya Air Minum Galon	12.0 BLN	900,000	10,800,000	
	- Biaya Penerimaan Tamu	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Pengadaan/Penggantian Inventaris (yg berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor dibawah nilai kapitalisasi)	8.0 OT	956,250	7,650,000	
	- Perjalanan	1.0 THN	7,571,000	7,571,000	
	- Keperluan Rumah Tangga Kantor	1.0 THN	13,910,000	13,910,000	
	- Hand Sanitizer	1.0 THN	2,200,000	2,200,000	
	- Disinfektan	1.0 THN	2,795,000	2,795,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.020-Serang)			105,874,000	RM
	- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	79.0 OT	1,254,735	99,124,000	
	- Masker	1.0 THN	6,750,000	6,750,000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			712,500,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			158,100,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 BLN	12,000,000	144,000,000	
	- Lisensi Video Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Domain	1.0 THN	100,000	100,000	
	- Langganan Lisensi Anti Virus	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan VPS (Virtual Private Server)	1.0 THN	8,000,000	8,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.020-Serang)			16,800,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	1,400,000	16,800,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.020-Serang)			3,600,000	RM
	- Langganan Telpon	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.020-Serang)			534,000,000	RM
	- Sewa Mesin Fotocopy	8.0 UNIT	65,655,000	525,240,000	
	- Honor Panitia Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	3.0 OP	920,000	2,760,000	
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
C	PEMELIHARAAN PERKANTORAN			834,961,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 24,941,516,000

Halaman: 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.020-Serang)			419,129,000	RM
	- Tambahan Pemeliharaan Gedung [320 m2]	320.0 M2	153,000	48,960,000	
	- Pemeliharaan Ruang Arsip dan Perpustakaan	80.0 M2	100,000	8,000,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Gudang	82.0 M2	100,000	8,200,000	
	- Pemeliharaan Tempat Penbadatan/Mushola	156.0 M2	50,000	7,800,000	
	- Pemeliharaan Gedung 2 lantai (termasuk listrik, internet, telepon)	2310.0 M2	131,805	304,469,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	3950.0 M2	10,000	39,500,000	
	- Pemeliharaan Rumah Genset	9.0 M2	111,112	1,000,000	
	- Pemeliharaan Pos Jaga	10.0 M2	120,000	1,200,000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.020-Serang)			76,600,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Type A	260.0 M2	66,924	17,400,000	
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Type B	252.0 M2	95,239	24,000,000	
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Type C	411.0 M2	85,645	35,200,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang)			339,232,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	6.0 UNIT	22,592,000	135,552,000	
	- Tambahan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 4 Pinjam Pakai	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Roda 4 (sewa)	2.0 UNIT	20,000,000	40,000,000	
	- Bahan Bakar (BBM) Kendaraan Sewa Hiac	1.0 thn	15,000,000	15,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	6.0 UNIT	2,000,000	12,000,000	
	- Pemeliharaan PC	42.0 UNIT	504,048	21,170,000	
	- Pemeliharaan Laptop/Notebook	34.0 UNIT	730,000	24,820,000	
	- Pemeliharaan Printer	26.0 UNIT	636,924	16,560,000	
	- Pemeliharaan AC Split	46.0 UNIT	596,740	27,450,000	
	- Pemeliharaan Genset	1.0 THN	7,500,000	7,500,000	
	- Bahan Bakar Genset	1.0 THN	7,000,000	7,000,000	
	- Pemeliharaan inventaris Kantor	71.0 OT	80,000	5,680,000	
	- Pemeliharaan Pompa Air	2.0 UNIT	750,000	1,500,000	
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			172,324,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.020-Serang)			69,232,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai [1 STEL x 53 ORG]	53.0 STEL	800,000	42,400,000	
	- Pakaian Kerja Satpam [1 STEL x 4 ORG]	4.0 STEL	1,300,000	5,200,000	
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [1 STEL x 11 ORG]	11.0 STEL	600,000	6,600,000	
	- Name tag hakim dan pegawai [1 BUAH x 95 ORG]	95.0 STEL	100,000	9,500,000	
	- Tambahan Seragam Pegawai [3 ORANG x 2 STEL]	6.0 STEL	922,000	5,532,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (863398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 24,941,516,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.020-Serang)			103,092,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,107,000	25,284,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,044,000	24,528,000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,090,000	13,080,000	
	- Honor Staf Pengelola PNBK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	600,000	14,400,000	
	- Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (tingkat korwil) [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	300,000	7,200,000	
E	<u>PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN</u>			21,510,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.020-Serang)			20,310,000	RM
	- Snack [90 ORG x 3 KEG]	270.0 OK	19,000	5,130,000	
	- Makan [90 ORG x 3 KEG]	270.0 OK	54,000	14,580,000	
	- Spanduk	3.0 KEG	200,000	600,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.020-Serang)			1,200,000	RM
	- Jasa Rohaniawan	3.0 OK	400,000	1,200,000	
F	<u>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</u>			20,520,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.020-Serang)			20,520,000	RM
	- Snack Untuk Rapat [90 ORG x 12 KEG]	1080.0 OK	19,000	20,520,000	
G	<u>KONSULTASI KE PUSAT</u>			111,520,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang)			111,520,000	RM
	- Tiket [1 ORG x 1 PP x 1 KEG]	1.0 OK	3,280,000	3,280,000	
	- Penginapan [5 ORG x 1 HR x 4 KEG]	24.0 OH	600,000	19,200,000	
	- Uang Harian [7 ORG x 2 HR x 12 KEG]	168.0 OH	530,000	89,040,000	
H	<u>PEMBINAAN/RAPAT KOORDINASI PADA TINGKAT BANDING</u>			16,160,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.020-Serang)			16,160,000	RM
	- Bahan/Materi	4.0 KEG	1,120,000	4,480,000	
	- Konsumsi makan [40 ORG x 4 KEG]	160.0 OK	54,000	8,640,000	
	- Konsumsi snack [40 ORG x 4 KEG]	160.0 OK	19,000	3,040,000	
I	<u>KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL</u>			6,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.020-Serang)			6,600,000	RM
	- Transport [4 ORG x 11 KEG]	44.0 OK	150,000	6,600,000	
J	<u>Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc</u>			287,280,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.020-Serang)			287,280,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [19 ORG x 12 BLN]	228.0 OB	1,260,000	287,280,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 24,941,516,000

Halaman: 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Pembinaan/Pengawasan			51,120,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang)			1,600,000	RM
	- Bahan/Materi	2.0 KEG	800,000	1,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang)			49,520,000	RM
	- Uang Harian ke PN Serang [2 KEG x 11 ORG x 2 HR]	44.0 OK	150,000	6,600,000	
	- Uang Harian ke PN Tangerang [2 KEG x 11 ORG x 2 HR]	44.0 OK	370,000	16,280,000	
	- Uang Harian ke PN Pandeglang [2 KEG x 9 ORG x 2 HR]	36.0 OK	370,000	13,320,000	
	- Uang Harian ke PN Rangkasbitung [2 KEG x 9 ORG x 2 HR]	36.0 OK	370,000	13,320,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Serang, 30 November 2022


Drs. SUTIKNO, M.H.
 NIP 196910151997031002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENYAN: LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (663399) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 176,444,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			176,444,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			176,444,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	5.0 kegiatan		65,000,000	
	Lokasi : KOTA SERANG				
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	5.0 kegiatan		85,000,000	
052	Dukungan Penyelesaian Perkara			85,000,000	U
A	Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding			85,000,000	
521211	Belanja Bahan			150,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Atk dan Penjilidan laporan	1.0 keg	150,000	150,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			84,850,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Transpot [10 orang x 5 keg]	50.0 OH	175,000	8,750,000	
	- Uang harian [10 orang x 2 hari x 5 keg x 2 kl]	200.0 OH	370,000	74,000,000	
	- Uang harian [1 Org x 2 hari x 5 keg]	10.0 OH	210,000	2,100,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	157.0 Perkara, Berkas Perkara		91,444,000	
	Lokasi : KOTA SERANG				
1049.BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	134.0 Perkara		74,504,000	
051	Pengiriman surat penahanan			20,100,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,100,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			6,700,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan / Penetapan Penahanan [1 orang x 134 Keg]	134.0 OK	50,000	6,700,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			13,400,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan [1 orang x 134 keg]	134.0 OK	100,000	13,400,000	
052	Pencatatan register banding			27,604,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			27,604,000	
521211	Belanja Bahan			1,340,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (untuk majelis)	134.0 PKR	10,000	1,340,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			26,264,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Alat Tulis Kantor	134.0 PKR	196,000	26,264,000	
053	Minutasi			6,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,700,000	
521211	Belanja Bahan			6,700,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (kirim ke pengadilan pengaju)	134.0 PKR	50,000	6,700,000	
054	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju			20,100,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (663399) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 176,444,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang)			6,700,000	RM
	- Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju	134.0 PKR	50,000	6,700,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang)			13,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju (pegawai) [1 orang x 134 keg]	134.0 OK	100,000	13,400,000	
1049.BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Bandung di wilayah Barat	23.0 Perkara		16,940,000	
051	Pengiriman surat penahanan			4,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang)			4,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan [1 orang x 40 keg]	40.0 OK	100,000	4,000,000	
052	Pencatatan register banding			8,940,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,940,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.020-Serang)			1,500,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (untuk majelis)	20.0 PKR	75,000	1,500,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang)			7,440,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	30.0 PKR	248,000	7,440,000	
053	Minutasi			2,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.020-Serang)			2,000,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (kirim ke pengadilan pengaju)	20.0 PKR	100,000	2,000,000	
054	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju			2,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang)			2,000,000	RM
	- Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju (pegawai) [1 orang x 20 keg]	20.0 OK	100,000	2,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Serang, 30 November 2022


Drs. Sytikno, M.H.
 NIP 196910151997031002

KODE	Program/Kegiatan/KBO/RO/Komponen/ SubKomp / Detil	Jumlah Biaya	KEBUTUHAN DAMA												Perkiraan dana yang tidak dapat diarbit	TOTAL
			JAN	FEB	MERT	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24.081.923	1.418.428	2.246.406	1.714.250	3.284.718	1.815.814	1.760.288	3.176.436	1.864.214	1.740.076	1.882.886	1.079.211	2.237.989	59.593	25.081.109
	Belanja Pembinaan Cpb PNS (gaji ke 13)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Belanja Pembinaan Cpb PNS (gaji ke 14)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
511121	Belanja Tunj Suami/Istri PNS	391.180	24.530	26.000	26.000	53.000	26.000	26.000	53.000	26.000	30.000	30.000	30.000	40.650	0	391.180
	Belanja Tunj Suami/Istri PNS	337.180	24.530	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000	40.650	0	337.180
	Belanja Tunj Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
	Belanja Tunj Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
511122	Belanja Tunj Anak PNS	63.934	3.405	3.600	4.000	8.100	4.000	4.000	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000	7.729	0	63.934
	Belanja Tunj Anak PNS	55.734	3.405	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.729	0	55.734
	Belanja Tunj Anak PNS (gaji ke 13)	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
	Belanja Tunj Anak PNS (gaji ke 14)	4.100	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100
511123	Belanja Tunj Struktural PNS	93.870	6.705	6.705	6.705	13.410	6.705	6.705	13.410	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	0	93.870
	Belanja Tunjangan Struktural PNS	88.460	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	0	88.460
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	6.705	0	0	0	0	0	0	6.705	0	0	0	0	0	0	6.705
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	6.705	0	0	0	0	6.705	0	0	0	0	0	0	0	0	6.705
511124	Belanja Tunj Fungsional PNS	12.640.730	817.110	850.000	920.000	1.740.000	920.000	920.000	1.740.000	920.000	920.000	920.000	920.000	1.053.620	0	12.640.730
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.000.730	817.110	850.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	1.053.620	0	11.000.730
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	820.000	0	0	0	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0	0	820.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	820.000	0	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
511125	Belanja Tunj PPh PNS	2.417.944	140.228	160.000	160.000	370.119	170.000	170.000	370.119	170.000	170.000	170.000	170.000	197.478	0	2.417.944
	Belanja Tunjangan PPh PNS	2.017.206	140.228	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	197.478	0	2.017.206
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	200.119	0	0	0	0	0	0	200.119	0	0	0	0	0	0	200.119
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	200.119	0	0	0	0	200.119	0	0	0	0	0	0	0	0	200.119
511126	Belanja Tunj Beras PNS	186.000	11.442	12.000	12.000	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	18.058	0	186.000
	Belanja Ulang Makan PNS	700.000	0	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	116.670	0	700.000
	Belanja Ulang Makan PNS	700.000	0	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	116.670	0	700.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	36.930	2.570	3.077	3.077	6.557	3.077	3.077	6.557	3.077	3.077	3.077	3.077	3.590	0	36.930
	Belanja Tunjangan Umum PNS	36.930	2.570	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.590	0	36.930
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	3.480	0	0	0	0	0	0	3.480	0	0	0	0	0	0	3.480
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	3.480	0	0	0	0	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480
511158	Belanja Tunjangan Hakam Ad Hoc	464.285	25.000	25.000	25.000	60.000	25.000	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.285	0	464.285
	Tunjangan Hakam Ad Hoc	464.285	25.000	25.000	25.000	60.000	25.000	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.285	0	464.285

KODE	Program/Regiatan/NERO/RO/Komponen/ Subkomponen / Detail	Jumlah Biaya	KEBUTUHAN DANA												TOTAL	
			KETERANGAN													
			JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24,081,923	1,410,428	2,246,406	1,714,250	3,284,718	1,815,914	1,760,288	3,176,636	1,864,214	1,740,878	1,892,886	1,879,211	2,237,989	59,593	25,001,109
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,960,635	81,206	780,687	172,575	260,691	237,195	181,669	158,909	284,095	156,759	157,174	243,092	238,585	0	2,960,635
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERSANTORAN	726,140	33,128	53,576	57,906	96,986	54,006	55,206	54,006	57,756	55,266	54,006	54,006	100,352	0	726,140
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	620,266	3,861	47,276	40,656	90,406	47,706	40,906	47,706	47,706	48,906	47,706	47,706	93,495	0	620,266
	Honorarium Pramsabakti	227,472	0	18,956	18,956	18,956	18,956	18,956	18,956	18,956	18,956	18,956	18,956	37,912	0	227,472
	Pengisian/Penggantian inventaris (yg berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor dibawah nilai kapitalisasi)	7,650	1,810	337	337	837	637	637	637	637	637	637	637	670	0	7,650
	Pesajidan	7,571	0	500	630	630	630	630	630	630	630	630	630	1,401	0	7,571
	Keperluan Rumah Tangga Kantor	13,910	647	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,673	0	13,910
	Hand Sanitizer	2,200	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	700	0	2,200
	Duaplektan	2,795	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	695	0	2,795
	Honorarium Sopan	142,944	0	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	23,824	0	142,944
	Honorarium Programdi	142,944	0	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	11,912	23,824	0	142,944
	THR Pramsabakti	18,956	0	0	0	18,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,956
	THR Sopan	11,912	0	0	0	11,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,912
	THR Programdi	11,912	0	0	0	11,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,912
	Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	15,680	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,600	0	15,680
	Biaya Air Minum Galin	10,850	721	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1,079	0	10,850
	Biaya Penerimaan Tamu	3,690	203	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	317	0	3,690
521811	Belanja Barang Persediaan Berang Kuasamu	165,874	29,267	6,300	9,260	6,300	6,300	6,300	6,300	10,050	6,300	6,300	6,300	6,857	0	165,874
	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	99,124	29,267	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,857	0	99,124
	Masker	6,750	0	0	3,000	0	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	6,750
B	LANGGANAN DANA DAN JASA	712,500	12,227	538,050	24,710	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	16,000	13,000	24,114	0	712,500
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	150,100	12,000	12,000	15,160	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	12,000	12,000	0	150,100
	Langganan Internet	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	144,000
	Lisensi Video Conference	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
	Langganan Domain	100	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Langganan Lisensi Anti Virus	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dikawatir Pos Pusat	16,800	0	1,600	1,560	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	16,800
	Biaya Pengiriman Surat Dikawatir	16,800	0	1,600	1,560	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	16,800
522112	Belanja Langganan Telepon	3,690	227	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	374	0	3,690
	Langganan Telpon	3,690	227	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	374	0	3,690
522141	Belanja Sewa	542,000	0	523,950	7,810	0	0	0	0	0	0	0	0	10,240	0	542,000

KODE	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/ Subkomp / Detil	Jumlah Biaya	KEBUTUHAN DANA												Terdapat dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL
			JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24.081.923	1.418.428	2.246.406	1.714.250	3.284.718	1.015.914	1.760.288	3.176.436	1.864.214	1.740.878	1.892.886	1.879.211	2.237.909	59.593	25.081.109
	Sewa Mesin Fotocopy	525.240	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.240	0	525.240
	Insor Parenta Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	2.740	0	0	2.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740
	Langganan Web Hosting	14.000	0	8.950	5.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
C	PEMBELIHAN PERKANTORAN	834.961	16.225	97.000	61.802	62.442	76.978	67.974	68.962	119.978	66.162	61.778	58.512	77.940	0	834.961
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	419.129	1.800	58.200	33.320	33.080	40.280	33.080	40.980	33.080	32.080	33.080	32.080	40.140	0	419.129
	Tambahan Pemeliharaan Gedung	48.960	0	4.200	6.120	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	8.000	0	48.960
	Pemeliharaan Ruang Arsip dan Perpustakaan	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
	Pemeliharaan Bangunan Gudang	8.200	0	0	0	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200
	Pemeliharaan Tempat Perhatalan/Mushola	7.890	0	0	0	0	0	0	7.890	0	0	0	0	0	0	7.890
	Pemeliharaan Gedung 2 lantai (Brimasuk listrik, internet,telepon)	384.469	180	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	29.369	0	384.469
	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	39.500	1.700	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.800	0	39.500
	Pemeliharaan Rumah Gesert	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	Pemeliharaan Pos Jaga	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	76.600	0	0	0	0	0	5.000	0	59.200	5.000	0	0	7.400	0	76.600
	Pemeliharaan Rumah Dinas Type A	17.400	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	7.400	0	17.400
	Pemeliharaan Rumah Dinas Type B	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	Pemeliharaan Rumah Dinas Type C	35.200	0	0	0	0	0	0	0	35.200	0	0	0	0	0	35.200
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	339.232	14.425	38.800	28.582	28.462	27.698	29.894	28.082	27.698	29.082	28.698	26.432	30.379	0	339.232
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	135.552	5.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.000	11.352	0	135.552
	Pemeliharaan Gesert	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
	Bahan Bakar Gesert	7.000	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	2.500	0	7.000
	Pemeliharaan Inventaris Kantor	5.680	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	680	0	5.680
	Pemeliharaan Pompa Air	1.500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	1.500
	Tambahan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 4 Pindah Pakai	25.000	0	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0	25.000
	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Roda 4 (sewa)	40.000	4.100	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	2.900	0	40.000
	Bahan Bakar (BBM) Kendaraan Sewa Hiasa	15.000	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	15.000
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	12.000	175	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.625	0	12.000
	Pemeliharaan PC	21.170	0	2.500	1.764	1.764	2.000	1.764	1.764	2.000	1.764	2.000	1.764	2.086	0	21.170
	Pemeliharaan Laptop/Notebook	24.820	700	3.000	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.076	0	24.820
	Pemeliharaan Printer	16.540	4.250	500	500	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.860	0	16.540

KODE	Program/Kegiatan/RBO/RSD/Komponen/ SubKomp / Detail	Jumlah Biaya	KEBUTUHAN DANA												TOTAL	
			JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24.081.923	1.410.428	2.246.406	1.714.250	3.284.718	1.815.814	1.760.288	3.176.436	1.864.214	1.740.078	1.892.886	1.879.211	2.237.989	59.593	25.001.109
	Pembayaran AC Split	27.450	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.450	0	27.450
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	172.324	3.634	0.591	15.057	68.323	0.591	0.591	0.591	0.591	0.591	0.591	0.591	17.182	0	172.324
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	69.232	3.634	0	6.466	59.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.232
	Pokokan Dinas Pegawai	42.400	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400
	Pokokan Kerja Satpam	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200
	Pokokan Kerja Pengemudi/Petugas Maintenance/Operasional	6.600	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600
	Naam tag hakim dan pegawai	9.590	3.634	0	6.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.590
	Tambahan Seragam Pegawai	5.532	0	0	5.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.532
521115	Belanja Honor Operasional Subsatun Kerja	103.092	0	8.591	0.591	8.591	8.591	8.591	8.591	8.591	8.591	8.591	8.591	17.182	0	103.092
	Honor Kuisa Pengawasan Anggaran	25.284	0	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	4.214	0	25.284
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	24.528	0	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	4.088	0	24.528
	Honor Penguji Tagihan dan Penastidastaganan SPN	15.000	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	2.500	0	15.000
	Honor Bendahara Pengeluaran	13.080	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	2.180	0	13.080
	Honor Staf Pengelola PNPB	3.660	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	600	0	3.660
	Honor Staf Pengelola Keuangan	14.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400	0	14.400
	Honor Pengelola Sistem Akuntansi Timbang (Unggah Inhouse)	7.200	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.200	0	7.200
E	PELANTIKAN DAN SUMPAIN JABATAN	21.510	0	0	14.340	0	0	0	0	0	0	0	0	7.170	0	21.510
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.310	0	0	13.540	0	0	0	0	0	0	0	0	6.770	0	20.310
	Snack	5.130	0	0	3.420	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710	0	5.130
	Makan	14.580	0	0	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860	0	14.580
	Spondak	600	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	600
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.200	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1.200
	Jasa Rohanawati	1.200	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1.200
F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	20.520	6.241	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.279	0	20.520
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.520	6.241	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.279	0	20.520
	Snack Untuk Rapat	20.520	6.241	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.279	0	20.520
G	KONSULTASI KE PUSAT	111.520	3.630	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.610	0	111.520
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.520	3.630	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.610	0	111.520
	Tiket	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	3.200
	Penginapan	10.200	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.700	0	19.200
	Uang Harian	89.040	3.630	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.910	0	89.040

KODE	Program/Kegiatan/IBD/BD/Komponen/ Subkomponen / Detail	Jumlah Biaya	KEBUTUHAN DANA												TOTAL	
			JAN 4	FEB 5	MRT 6	APRIL 7	MAY 8	JUNI 9	JULI 10	AGUST 11	SEPT 12	OKT 13	NOV 14	DES 15		TOTAL
I	2	3	1,418,428	2,246,406	1,714,250	3,284,710	1,815,014	1,760,280	3,176,436	1,864,214	1,740,078	1,802,886	1,879,211	2,237,989	59,593	25,001,109
II	PEMBINAAN/RAPAT KOORDINASI PADA TINGKAT BANDING	16,160	2,597	400	1,600	1,450	1,600	900	2,150	900	1,600	1,469	1,015	480	0	16,160
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16,160	2,597	400	1,600	1,450	1,600	900	2,150	900	1,600	1,469	1,015	480	0	16,160
	Bahan/Materi	4,480	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	4,480
	Konsumsi makan	6,640	1,225	0	1,200	500	1,200	500	1,200	500	1,200	500	615	0	0	6,640
	Konsumsi snack	3,040	1,372	0	0	550	0	0	550	0	0	569	0	0	0	3,040
I	KONSULTASI KE RPPN/KANWIL DJPB/KPKNL	6,600	900	450	600	450	600	450	600	450	600	450	600	450	0	6,600
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,600	900	450	600	450	600	450	600	450	600	450	600	450	0	6,600
	Transport	6,600	900	450	600	450	600	450	600	450	600	450	600	450	0	6,600
I	Biak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	287,280	0	71,820	0	0	71,820	0	0	71,820	0	0	71,820	0	0	287,280
522141	Belanja Sewa	287,280	0	71,820	0	0	71,820	0	0	71,820	0	0	71,820	0	0	287,280
	Bantuan Sewa Rumah Dinas	287,280	0	71,820	0	0	71,820	0	0	71,820	0	0	71,820	0	0	287,280
I	Pembinaan/Pengawasan	51,120	3,225	0	0	0	0	21,948	0	0	0	0	23,948	0	0	51,120
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,600	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	1,600
	Bahan/Materi	1,600	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	1,600
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	49,520	3,225	0	0	0	0	23,148	0	0	0	0	23,148	0	0	49,520
	Uang Harian ke PN Serang	6,600	450	0	0	0	0	3,075	0	0	0	0	3,075	0	0	6,600
	Uang Harian ke PN Tangerang	16,280	1,665	0	0	0	0	7,308	0	0	0	0	7,308	0	0	16,280
	Uang Harian ke PN Pandeglang	13,320	1,110	0	0	0	0	6,105	0	0	0	0	6,105	0	0	13,320
	Uang Harian ke PN Bangkalisong	13,320	0	0	0	0	0	6,660	0	0	0	0	6,660	0	0	13,320
	TOTAL	24,881,923	1,418,428	2,246,406	1,714,250	3,284,710	1,815,014	1,760,280	3,176,436	1,864,214	1,740,078	1,802,886	1,879,211	2,237,989	59,593	25,001,109

RPD TRIWULAN	21,62%	5,379,003	49,19%	12,239,903	76,45%	19,021,431	100,24%	24,941,516
RPD BERDASARKAN PERATURAN KEMENKUMH	15%	3,732,280,45	40%	9,932,769,20	60%	14,929,153,80	90%	22,393,730,70

Mengertahui,



Ruaid, Pengawas Anggaran
DJ. SUTIRNO, M.H.
 NIP. 196910151997931002

Kasubag Rencana Program dan Anggaran

SRI DIAN GUNARSIH, S.E., AKH
 NIP. 19811218 200804 2 003

Serang, 07 Januari 2023
 Perencana Ahli Pertama

YENYULYANI, S.E.
 NIP. 198381519 200912 2 001

RENCANA PENARIKAN DANA DIPD 03 TAHUN 2022

Satuan Kerja : 03. 663399

PENGADILAN TINGGI BANTEN

DALAM RIBUAN RUPIAH

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP / DETAIL	PAGU ANGGARAN	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL
			JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
005.03.BF	Program Pengakuan dan Pelayanan Hukum	176,444	20,184	6,400	5,000	5,300	21,720	40,800	5,950	4,100	4,800	53,550	4,800	3,840	0	176,444
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	176,444	20,184	6,400	5,000	5,300	21,720	40,800	5,950	4,100	4,800	53,550	4,800	3,840	0	176,444
1049.AEA	Koordinasi	85,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	48,000	0	0	0	85,000
AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	85,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	48,000	0	0	0	85,000
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	85,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	48,000	0	0	0	85,000
A	Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding	85,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	48,000	0	0	0	85,000
521211	Belanja Bahan	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
	Atk dan Penjilidan laporan	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84,850	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	47,850	0	0	0	84,850
	Transport	8,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750	0	0	0	8,750
	Uang harian	74,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	37,000	0	0	0	74,000
	Uang harian	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	2,100
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	91,444	20,184	6,400	5,000	5,300	21,720	3,800	5,950	4,100	4,800	5,550	4,800	3,840	0	91,444
BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	74,504	20,184	4,500	4,600	3,400	13,880	3,400	4,300	3,700	4,400	3,900	4,400	3,840	0	74,504
051	Pengiriman surat penahanan	20,100	3,600	1,800	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,800	1,700	0	20,100
A	TANPA SUB KOMPONEN	20,100	3,600	1,800	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,800	1,700	0	20,100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,700	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	0	0	6,700
	Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan / Penetapan Penahanan	6,700	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	0	0	6,700
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,400	0	1,500	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,400	1,700	0	13,400
	Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan	13,400	0	1,500	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,400	1,700	0	13,400
052	Pencatatan register banding	27,604	16,584	400	100	100	9,780	100	100	100	100	100	100	40	0	27,604
A	TANPA SUB KOMPONEN	27,604	16,584	400	100	100	9,780	100	100	100	100	100	100	40	0	27,604

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP / DETAIL	PAGU ANGGARAN	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL				
			JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES						
521211	Belanja Bahan	1,340	0	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	0	1,340	
	Penggunaan dan Penjilidan Berkas Perkara (untuk majelis)	1,340	0	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	0	1,340	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,264	16,594	0	0	0	0	9,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,264
	Alat Tulis Kantor	26,264	16,594	0	0	0	0	9,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,264
053	Minutasi	6,700	0	500	1,000	500	500	600	500	500	500	800	800	800	500	500	500	0	0	6,700
A	TANPA SUB KOMPONEN	6,700	0	500	1,000	500	500	600	500	500	500	800	800	800	500	500	500	0	0	6,700
521211	Belanja Bahan	6,700	0	500	1,000	500	500	600	500	500	500	800	800	800	500	500	500	0	0	6,700
	Penggunaan dan Penjilidan Berkas Perkara (kirim ke pengadilan pengalja)	6,700	0	500	1,000	500	500	600	500	500	500	800	800	800	500	500	500	0	0	6,700
054	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengalja	20,100	0	1,800	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,200	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,600	0	0	20,100
A	TANPA SUB KOMPONEN	20,100	0	1,800	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,200	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,600	0	0	20,100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,700	0	500	1,000	500	500	500	500	500	700	500	500	500	1,000	500	500	0	0	6,700
	Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengalja	6,700	0	500	1,000	500	500	500	500	500	700	500	500	500	1,000	500	500	0	0	6,700
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,400	0	1,300	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,100	0	0	13,400
	Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengalja (pegawai)	13,400	0	1,300	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,100	0	0	13,400
BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	16,940	0	1,900	400	1,900	1,900	7,840	400	1,650	400	400	400	400	1,650	400	0	0	0	16,940
051	Pengiriman surat penahanan	4,000	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	4,000
A	TANPA SUB KOMPONEN	4,000	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	4,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,000	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	4,000
	Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan	4,000	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	4,000
052	Pencatatan register banding	8,940	0	500	0	500	500	7,440	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	8,940
A	TANPA SUB KOMPONEN	8,940	0	500	0	500	500	7,440	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	8,940
521211	Belanja Bahan	1,500	0	500	0	500	0	500	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	1,500

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP / DETAIL	PAGU ANGGARAN	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL		
			JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES				
	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (untuk majelis)	1,500	0	500	0	500	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	1,500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,440	0	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440
	Alat Tulis Kantor	7,440	0	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440
053	Minatasi	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
A	TANPA SUB KOMPONEN	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
521211	Belanja Bahan	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (kirim ke pengadilan pengaju)	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
054	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
A	TANPA SUB KOMPONEN	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
	Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju (pegawai)	2,000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000
	TOTAL	176,444	20,184	6,400	5,000	5,300	21,720	40,800	5,950	4,100	4,800	53,550	4,800	4,800	3,840	0	0	176,444

RPD TRIWULAN	17,90%	31,584	56,34%	99,404	64,75%	114,254	100,00%	176,444
RPD BERDASARKAN PERATURAN KEMENKU	15%	26,466.60	40%	70,577.60	60%	105,866.40	90%	158,799.60

Mengetahui,

Kuasa Pengantar Anggaran



Dr. SUTIKNO, M.H.

NIP. 196910151997031002

Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

Serang, 07 Januari 2023

Perencana Ahli Pertama

YENI YULIYANI, S.E.

NIP. 198301519 200912 2 001